

**ANALISIS RASIO KEUANGAN SEBAGAI PENGUKURAN KINERJA
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN SEBELUM DAN SETELAH PENERAPAN
ANGGARAN BERBASIS KINERJA**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Disusun Oleh :

MOCHAMMAD RIZAL SIDIK

NIM. F 1303067

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2008

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah mulai efektif dilaksanakan sejak 1 Januari 2001. Dalam UU tersebut Pemerintah Daerah (pemda) diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian hingga evaluasi, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama, dan kewenangan lain yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Sebagai konsekuensi dari otonomi yang luas, pemda mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan. Kewajiban tersebut dapat dipenuhi apabila pemda mampu mengelola potensi daerahnya, yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi sumber daya keuangan secara optimal (Halim,2007:229).

Otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah Dengan Sistem Pemerintahan Desentralisasi. Undang-undang tersebut merupakan kebijakan

yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintah yang sesungguhnya.

Sebenarnya pertimbangan mendasar terselenggaranya Otonomi Daerah (Otda) adalah perkembangan kondisi di dalam negeri yang mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian (desentralisasi). Selain itu keadaan luar negeri yang juga menunjukkan bahwa semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing tiap negara, termasuk daya saing pemerintah daerahnya. Daya saing pemerintah daerah ini diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintah daerah. Selanjutnya peningkatan kemandirian pemerintah daerah tersebut diharapkan dapat diraih melalui Otda (Halim 2007:1). Tujuan program otonomi daerah adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing. Hal ini ditempuh melalui peningkatan hak dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri (Bastian dalam www.jurnalskripsi.co.cc:2007).

Adapun misi utama Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tersebut bukan hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan pembangunan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah efisiensi dan efektivitas

sumber daya keuangan. Untuk itu diperlukan suatu laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah berikut dengan analisis prestasi pengelolaan sumber daya keuangan daerah itu sendiri (Bastian dalam www.jurnalskripsi.co.cc:2007). Hal tersebut sesuai dengan ciri penting dari suatu daerah otonom yang mampu menyelenggarakan otonomi daerahnya yaitu terletak pada strategi sumber daya manusia (SDM) dan kemampuan di bidang keuangan daerah (Soedjono dalam www.jurnalskripsi.co.cc:2007).

Analisis prestasi dalam hal ini adalah kinerja dari pemerintah daerah itu sendiri dapat didasarkan pada kemandirian dan kemampuannya untuk memperoleh, memiliki, memelihara dan memanfaatkan keterbatasan sumber-sumber ekonomis daerah untuk memenuhi seluas-luasnya kebutuhan masyarakat di daerah. Seperti yang diungkapkan Soedjono dalam www.jurnalskripsi.co.cc di mana penelitiannya dengan objek penelitian pemerintah kota Surabaya bahwa sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Proses penyusunan anggaran sektor publik umumnya disesuaikan dengan peraturan lembaga yang lebih tinggi. Sejalan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan

Undang-Undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang direvisi menjadi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lahirlah tiga paket perundang-undangan, yaitu UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang telah membuat perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengaturan keuangan, khususnya Perencanaan dan Anggaran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Kemudian, saat ini keluar peraturan baru yaitu PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menggantikan Kepmendagri nomor 29 tahun 2002.

Dalam reformasi anggaran tersebut, proses penyusunan APBD diharapkan menjadi lebih partisipatif. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002 pasal 17 ayat 2, yaitu dalam menyusun arah dan kebijakan umum APBD diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat, berpedoman pada rencana strategis daerah dan dokumen perencanaan lainnya yang ditetapkan daerah, serta pokok-pokok kebijakan nasional dibidang keuangan daerah. Selain itu sejalan dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang perimbangan keuangan negara akan pula diterapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja di sektor publik agar penggunaan anggaran tersebut bisa

dinilai kemanfaatan dan kegunaannya oleh masyarakat (Abimanyu dalam www.jurnalskripsi.co.cc:2007).

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 menetapkan bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai. Untuk mendukung kebijakan ini perlu dibangun suatu sistem yang dapat menyediakan data dan informasi untuk menyusun APBD dengan pendekatan kinerja. Anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Adapun kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik (Mariana dalam www.jurnalskripsi.co.cc:2007). Tetapi dalam mengimplementasikan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002 tersebut masih banyak pemerintah daerah yang mengalami kesulitan karena kurangnya pelatihan dan pendampingan dari pemerintah pusat. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa belanja aparatur lebih tinggi dibandingkan dengan belanja publik (Roesman dan Dendis dalam www.jurnalskripsi.co.cc:2007).

Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menggantikan Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002. Permendagri Nomor 13 diharapkan dapat lebih mudah diterapkan dan meminimalisir tumpang tindih anggaran. Kemampuan Pemda dalam mengelola keuangan dituangkan dalam Anggaran dan Belanja Daerah (APBD)

yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemda dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Grobogan telah melaksanakan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang belum menerapkan anggaran berbasis kinerja, Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang di dalamnya mengandung pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Pemerintah pusat menerapkan aturan tersebut guna memperbaiki pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pemda Grobogan sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemda berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemda dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya, hasil analisis rasio keuangan tersebut selanjutnya digunakan sebagai tolak ukur dalam:

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasi pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemda dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.

4. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaranyang dilakukan selama periode waktu tertentu.
5. Membandingkan perbedaan pengelolaan keuangan daerah sebelum dan setelah anggaran berbasis kinerja.

Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang rasio keuangan daerah sebagai sebuah alat untuk mengukur kinerja pemerintah daerah sebelum dan setelah anggaran berbasis kinerja diterapkan, dalam penulisan ini, penulis mengambil judul “ **Analisis Rasio Keuangan sebagai Pengukuran Kinerja Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Sebelum dan Setelah Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja**”.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah sebelum dan setelah anggaran berbasis kinerja diterapkan dalam Pemerintah Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana kemampuan Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dengan target yang ditetapkan sebelum dan setelah anggaran berbasis kinerja diterapkan?

3. Dimanakah prioritas alokasi dana, belanja rutin atau belanja pembangunan Pemerintah Kabupaten Grobogan sebelum dan setelah anggaran berbasis kinerja diterapkan?
4. Apakah terdapat perbedaan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima sebelum dan setelah anggaran berbasis kinerja diterapkan dalam Pemerintah Kabupaten Grobogan?
5. Bagaimana kemampuan Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya sebelum dan setelah anggaran berbasis kinerja diterapkan?
6. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan keuangan daerah sebelum dan sesudah anggaran berbasis kinerja diterapkan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah kemandirian daerah terhadap sumber dana eksternal sebelum dan setelah anggaran berbasis kinerja diterapkan dalam Pemerintah Kabupaten Grobogan.
2. Untuk mengetahui bagaimana kemampuan Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dengan target yang ditetapkan sebelum dan setelah anggaran berbasis kinerja diterapkan.

3. Untuk mengetahui di mana prioritas alokasi dana belanja rutin atau belanja pembangunan Pemerintah Kabupaten Grobogan sebelum dan setelah anggaran berbasis kinerja diterapkan.
4. Untuk mengetahui perbedaan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima sebelum dan setelah anggaran berbasis kinerja diterapkan dalam Pemerintah Kabupaten Grobogan.
5. Untuk mengetahui bagaimana kemampuan Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya sebelum dan setelah anggaran berbasis kinerja diterapkan.
6. Untuk mengetahui perbedaan yang signifikan antara kemampuan keuangan daerah sebelum dan sesudah anggaran berbasis kinerja diterapkan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat berikut ini.

1. Menyajikan informasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan pada khususnya mengenai rasio keuangan APBD sebagai alat untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan setelah anggaran berbasis kinerja diterapkan.

2. Memberi masukan terhadap pemerintah pusat mengenai masalah keuangan daerah dan masalah anggaran berbasis kinerja.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan ilmiah, yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan penelitian selanjutnya oleh para akademisi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

1. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasar pada Undang-undang No. 25 Tahun 1999, Bab II, Dasar-dasar Pembiayaan Pemerintah Daerah, Pasal 2 No. 13 menyebutkan bahwa, APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD. Dalam penyusunannya didasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri serta pertimbangan lainnya dengan maksud agar penyusunan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi APBD mudah untuk dilakukan.

2. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berbasis kinerja

Berdasar pada Lampiran VI Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 menyebutkan bahwa, APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Berdasarkan pendekatan kinerja, APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu anggaran. Oleh karena itu, dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD menyusun Arah dan Kebijakan

Umum APBD yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. Kebijakan yang dimuat dalam arah dan kebijakan umum APBD, selanjutnya menjadi dasar untuk penilaian kinerja keuangan Daerah selama satu tahun anggaran.

3. Mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilihat sebagai berikut:

a. Pendapatan

- 1) Rencana Pendapatan yang sudah ditetapkan dibagi berdasarkan kemungkinan realisasinya dalam bentuk anggaran kas (*Cash Budget*). *Cash Budget* adalah anggaran yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pengeluaran karena adanya penerimaan yang labil realisasinya.
- 2) Realisasi dari pendapatan daerah masuk ke dalam kas daerah.

b. Belanja Daerah

Dalam belanja daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibagi menjadi Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan. Sesuai dengan Lampiran VII Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 menyebutkan bahwa, dalam pengalokasian belanja pada APBD didasarkan pada Standar Analisa Belanja (SAB). SAB merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBD dengan

pendekatan kinerja. SAB adalah standar untuk menganalisis anggaran belanja yang digunakan dalam suatu program atau kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dilihat Dari Fungsi

Dalam pelaksanaannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menganut sistem sebagai berikut:

- a. Pengurusan Administrasi, wewenang dalam rangka mengadakan tindakan-tindakan untuk penyelenggaraan rumah tangga daerah yang mengakibatkan pengeluaran-pengeluaran yang membebani anggaran.
- b. Pengurusan Kebendaharawanan, yaitu wewenang untuk menerima, menyimpan, membayar atau mengeluarkan uang dan barang serta berkewajiban mempertanggungjawabkannya kepada Kepala Daerah.

Berdasar pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002, Bab V, Penatausahaan Keuangan Daerah, Pasal 31 menyebutkan bahwa, Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Daerah. Kepala Daerah menetapkan keputusan tentang:

- a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO);
- b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);

- d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani Cek;
- e. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
- f. pejabat yang diberi wewenang mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Daerah;
- g. pejabat yang disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap Unit Kerja Pengguna Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas;
- h. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti dasar pemungutan pendapatan Daerah;
- i. pejabat yang diberi wewenang menandatangani Bukti Penerimaan Kas dan bukti pendapatan lainnya yang sah; dan
- j. pejabat yang diberi wewenang menandatangani ikatan atau perjanjian dengan Pihak ketiga yang mengakibatkan pendapatan dan pengeluaran APBD.

Selanjutnya Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 menyebutkan bahwa Bendahara Umum Daerah bertugas, sebagai berikut:

- a. Menatausahakan kas dan kekayaan Daerah lainnya.
- b. Bertanggungjawab kepada Kepala Daerah
- c. Menyimpan uang milik Daerah pada Bank yang sehat dengan cara membuka Rekening Kas Daerah boleh lebih dari satu rekening, dan

rekening tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD.

- d. Setiap bulan menyusun Rekonsiliasi Bank yang mencocokkan Saldo menurut pembukuan Bendahara Umum Daerah dengan saldo menurut Laporan Bank.
- e. Apabila uang milik Daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan, sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah dan Bunga deposito merupakan pendapatan daerah.
- f. Menyimpan seluruh bukti sah kepemilikan sertifikat atas kekayaan Daerah lainnya.
- g. Menyerahkan bukti transaksi yang asli atas penerimaan dan pengeluaran uang secara harian kepada unit yang melaksanakan akuntansi keuangan Daerah atas dasar pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilihat Dari Struktur

Dilihat dari stukturanya APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari (Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002, Bab II, Pasal 2):

- a. Pendapatan Daerah, adalah semua penerimaan yang merupakan hak Daerah dalam satu Tahun Anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah. Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas (Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999, Bab VIII, Keuangan Daerah, Pasal 28):

1). Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

a) pendapatan asli Daerah, yaitu:

(1) hasil pajak Daerah

(2) hasil retribusi Daerah

(3) hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

(4) lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;

b) dana perimbangan;

c) pinjaman Daerah; dan

d) lain-lain pendapatan Daerah yang sah (hibah atau penerimaan dari Daerah Propinsi atau Daerah Kabupaten/Kota lainnya, dan penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

2). Belanja Daerah, meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu Tahun Anggaran yang akan menjadi pengeluaran Kas Daerah.

3). Pembiayaan, meliputi transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 1998 Tentang Bentuk dan Struktur APBD dan selanjutnya di ubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002, bahwa sumber keuangan daerah Kabupaten/Kotamadya, terdiri sebagai berikut:

a. Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu

Sisa lebih anggaran tahun lalu adalah sisa anggaran tahun lalu yang tidak habis digunakan dan kemudian masuk sebagai penerimaan untuk tahun berikutnya, yang terdiri dari; sisa tunai pada kas daerah, sisa yang berada pada bendaharawan rutin dan sisa yang berada pada bendaharawan proyek/pembangunan. Sisa tersebut juga merupakan salah satu indikator tingkat keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan anggaran di mana semakin kecil nilainya akan menunjukkan baiknya kapasitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran tahun lalu, sepanjang hal tersebut dilaksanakan atas pertimbangan *value for money*.

b. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber-sumber PAD merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah yang bersangkutan. Sumber-sumber PAD terdiri sebagai berikut:

- 1). Pajak Daerah, adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Pungutan ini dikenakan pada semua obyek pajak seperti orang atau badan, benda bergerak atau nyata.
- 2). Retribusi Daerah, adalah pungutan yang dilakukan atas pembayaran atau pemakaian karena mendapatkan jasa yang

diberikan oleh Daerah atau dengan kata lain pungutan yang dilakukan secara langsung dan nyata.

- 3). Bagian Laba Badan Umum Milik Daerah (BUMD), merupakan penerimaan yang berwujud laba bersih BUMD, yang terdiri dari laba Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan bagian dari laba bersih BUMD yang lain.
 - 4). Penerimaan dari Dinas-dinas, merupakan penerimaan-penerimaan dari Dinas Pertanian, Peternakan, Kesehatan, dan Dinas yang lainnya.
 - 5). Penerimaan lain-lain yang sah, seperti Hasil Penjualan Milik Daerah, Penjualan Barang-barang Bekas, Cicilan Rumah yang dibangun oleh Pemerintah Daerah, dan lainnya.
- c. Bagian Pendapatan yang Berasal Dari Pemberian Pemerintah/Instansi yang Lebih Tinggi
- 1). Bagi Hasil Pajak, terdiri dari perolehan dari PBB, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPTHTB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - 2). Bagi Hasil Bkan Pajak, diperoleh dari Iuran Hasil Hutan (IHH), IHPH, royalti pertambangan, dan lain-lain.
- d. Dana Perimbangan Daerah
- Dana Perimbangan Daerah merupakan penerimaan daerah dalam bentuk sumbangan dan bantuan, terdiri atas dana rutin daerah untuk kebutuhan dana belanja pegawai dan pembangunan daerah untuk

belanja pembangunan, Khusus untuk alokasi dana pembangunan daerah terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU atau *Block Grant*) yang peruntukannya diserahkan pada Pemerintah Daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK atau *Specific Grant*) yang berupa bantuan program dan merupakan sasaran prioritas pembangunan nasional yang harus dilaksanakan daerah sesuai dengan peruntukan program dan jumlah dana yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat.

e. Pinjaman Daerah dan BUMD

Dana pinjaman merupakan pelengkap dari sumber-sumber penerimaan daerah yang ada dan ditujukan untuk membiayai pengadaan prasarana daerah yang ada atau harta tetap yang lain berkaitan dengan kegiatan yang bersifat meningkatkan penerimaan yang dapat digunakan untuk mengembalikan pinjaman dengan tujuan khusus lain, seperti mengatasi masalah jangka pendek yang berkaitan dengan arus kas daerah. Pinjaman daerah dapat bersumber dari pinjaman dalam negeri dan luar negeri. Pinjaman dalam negeri meliputi pinjaman Pemerintah Pusat, lembaga keuangan Bank, lembaga keuangan bukan Bank, masyarakat, dan sumber lainnya.

Pinjaman daerah menurut jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu pinjaman jangka panjang dan pinjaman jangka pendek. Pinjaman jangka panjang untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman serta memberikan manfaat pelayanan masyarakat. Pinjaman

jangka pendek dapat digunakan membantu kelancaran arus kas untuk keperluan jangka pendek dan untuk dana talangan tahap awal suatu investasi yang akan dibiayai dengan pinjaman jangka panjang, setelah ada kepastian tentang tersedianya pinjaman jangka panjang yang bersangkutan.

f. Sumbangan dan Bantuan

Sumbangan adalah pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah Pusat, Propinsi, sumbangan lain yang diatur dengan Peraturan Perundang-undangan. Sumbangan ini antara lain: imbalan, Subsidi Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri (SBPP-SDN), Subsidi Bantuan Pengembangan dan Pemeliharaan Obyek Pariwisata Daerah (SBPP-OPD), Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Daerah (TPAPD), dan lain-lain.

Bantuan, yaitu semua penerimaan bantuan atas Instruksi Presiden (Ipres) yang diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Madya dari Pemerintah Pusat maupun bantuan Pemerintah Daerah Propinsi.

g. Penerimaan Pembangunan

Penerimaan pembangunan daerah adalah penerimaan yang berasal dari pinjaman dan digunakan untuk belanja pembangunan yang sekaligus juga dapat dipakai sebagai modal pada BUMD. Penerimaan tersebut dirinci menurut sumber pinjaman untuk Pemerintah daerah dan

pinjaman untuk BUMN, bisa berupa pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri.

Sedangkan pos-pos pengeluaran atau belanja yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah sebagai berikut:

a. Pengeluaran Rutin

Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang tidak hanya digunakan untuk pembiayaan aparatur pemerintah, tetapi juga berguna untuk membiayai pengeluaran subsidi kepada daerah otonom, membantu Pemerintah Daerah membiayai kegiatan operasional dan pelaksanaan program-program pemerintah yang dilaksanakan di daerah. Pengeluaran ini terdiri dari sepuluh komponen, yaitu: Belanja Pegawai, Belanja barang, Biaya Pemeliharaan, Biaya Perjalanan Dinas, Biaya lain-lain, Angsuran Pinjaman dan Bunga, Imbalan, Subsidi dan Bantuan, Angsuran Pensiunan dan Bantuan, Pengeluaran tidak termasuk Bagian lainnya dan Pengeluaran Tidak Tersangka.

b. Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran Pembangunan merupakan pembiayaan rupiah dan proyek yang dialokasikan ke berbagai sektor sesuai dengan prioritas dan kebijaksanaan pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam GBHN. Secara sektoral pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran-pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai berbagai proyek di setiap sektor yang terdiri dari sektor Industri, Pertanian dan Kehutanan, Sumber daya Air dan Irigasi, Tenaga Kerja, Perdagangan,

Transportasi, Pertambangan dan Energi, Pariwisata, Kependudukan, Pendidikan, Agama, hukum, dan sektor lainnya.

Namun setelah terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002, format pengeluaran atau Belanja Daerah dalam APBD sudah tidak dikenal lagi Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan/proyek. Dalam Format yang baru ini, Belanja Daerah diubah menjadi Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Publik, selanjutnya dalam setiap jenis Belanja Daerah disusun menjadi 3 kelompok belanja yaitu sebagai berikut:

a. Belanja Administrasi Umum

Belanja Administrasi Umum adalah belanja tidak langsung yang dialokasikan pada kegiatan non investasi dan tidak menambah aset Daerah.

b. Belanja Operasional dan Pemeliharaan

Belanja Operasional dan pemeliharaan adalah belanja langsung yang dialokasikan pada kegiatan non investasi dan tidak menambah aset Daerah

c. Belanja Modal

Belanja Modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai investasi dan menambah aset daerah atau modal daerah yang bermanfaat langsung bagi masyarakat, yang mengarah pada perbaikan pelayanan masyarakat.

Secara garis besar berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002, bahwa bentuk/format penyusunan APBD telah berubah dan

mulai dipakai pada periode tahun anggaran 2003. Dalam tahun-tahun yang lalu format perhitungan APBD terdiri dari realisasi:

1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah, yaitu:
 - a. Belanja Rutin, dan
 - b. Belanja Pembangunan.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002, APBD disusun menjadi satu buku yang memuat seluruh realisasi APBD berdasarkan realisasi setiap obyek yang selanjutnya sebagai lampiran Peraturan Daerah dan penjabaran APBD merupakan realisasi perincian obyek yang selanjutnya merupakan lampiran Bupati. Format APBD yang baru yaitu sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah
3. Pembiayaan

Dalam format struktur APBD yang baru Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu dan Pinjaman tidak lagi dimasukkan sebagai unsur penerimaan daerah, namun dimasukkan sebagai Pembiayaan Daerah. Dengan struktur baru tersebut, akan lebih mudah untuk mengetahui surplus atau defisit, sehingga meningkatkan transparansi informasi anggaran kepada masyarakat (publik). Jika terjadi defisit anggaran, untuk menutupnya disediakan pos tambahan, yaitu pos “Pembiayaan”. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan

Belanja Daerah. Pemerintah Daerah juga dimungkinkan untuk membentuk Dana Cadangan. Dengan demikian anggaran tidak harus dihabiskan selama tahun anggaran bersangkutan, namun ditransfer ke dalam dana cadangan.

Dalam penyusunan APBD berdasarkan pada norma dan prinsip anggaran yang terdiri sebagai berikut:

- a. **Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran.** Hal ini berarti bahwa dalam APBD harus dapat memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan, selain itu dana yang diperoleh, penggunaan dari APBD tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan.
- b. **Disiplin Anggaran.** Penyusunan APBD harus dilakukan atas dasar asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. **Keadilan Anggaran.** Pemerintah wajib mengalokasikan penggunaan anggaran secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.
- d. **Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.** Dana yang tersedia melalui APBD harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.

B. TINJAUAN ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA APBD

Analisis rasio keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan yang tersedia. Penggunaan analisis rasio pada

sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan.

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki pemda tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama, untuk mengetahui bagaimana posisi rasio keuangan daerah tersebut terhadap pemda lainnya. Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain rasio kemandirian, rasio efektivitas dan efisiensi, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan.

1. **Rasio Kemandirian**

Menurut Widodo (2000:150) rasio kemandirian adalah rasio yang menunjukkan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan Pemerintah Pusat atau pinjaman.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{PAD}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat / Pr opinsi dan Pinjaman}}$$

Semakin tinggi hasilnya, berarti semakin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah, yang berarti juga bahwa ketergantungan akan bantuan dari pemerintah pusat semakin rendah.

2. Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian

Secara konseptual ada beberapa pola hubungan seperti apa yang dikemukakan oleh Paul Hersey dan Keneth Blancard dalam Nugroho (2003) yang memperkenalkan “Hubungan Situasional” yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan UU No. 25 1999 Tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, antara lain sebagai berikut:

- a. Pola Hubungan Instruktif, peranan Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah, rasio kemandirian berkisar antara 0% - 25% (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- b. Pola Hubungan Konsultatif, campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang dan daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Hal ini ditunjukkan dengan rasio kemandirian berkisar antara 25% - 50%.
- c. Pola Hubungan Partisipatif, peranan Pemerintah Pusat semakin berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah. Hal ini ditunjukkan dengan rasio kemandirian berkisar antara 50% - 75%.
- d. Pola Hubungan Delegatif, campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada, karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri melaksanakan urusan otonomi daerah. Hal ini ditunjukkan dengan rasio kemandirian berkisar antara 75% - 100%.

Tabel II

Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemandirian Keuangan	Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Buku Manajemen Keuangan Daerah, Penulis Abdul Halim

3. Rasio Efektivitas dan Efisiensi

a. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menurut Suhedi, Ramdan D (2000:109) menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan di banding dengan target yang di tetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Rasio Efektivitas =

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah}}$$

Kinerja keuangan pemerintah daerah dikategorikan efektif apabila rasio lebih dari 1 atau 100%.

b. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi menurut Suhedi, Ramdan D (2000:109) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

Kinerja keuangan pemerintah daerah dikategorikan efisien apabila rasio kurang dari 1 atau 100%.

4. Rasio Aktivitas

a. Rasio Keserasian

Menurut Widodo (2000:153) rasio keserasian menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi prosentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti prosentase belanja yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, rasio keserasian dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin (TBR)}}{\text{Total APBD}}$$

Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD =

$$\frac{\text{Total Belanja Pembangunan (TBP)}}{\text{Total APBD}}$$

b. Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

DSCR menurut Widodo (2000:156) merupakan perbandingan antara penjumlahan PAD, Bagian Daerah (BD) dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya serta Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi dengan Belanja Wajib (BW), dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo. DSCR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{(PAD + BD + DAU) - BW}{\text{Total (Pokok Angsuran + Bunga + Biaya Pinjaman)}} \geq 2,5$$

Dengan kata lain jumlah pokok hutang, bunga dan biaya pinjaman lainnya tidak lebih dari 2,5 kali PAD, Bagi Hasil, DAU, setelah dikurangi Belanja Wajib.

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

C. PENELITIAN TERDAHULU

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widodo (dalam Abdul Halim 2002) dengan Judul “Analisis Rasio Keuangan pada APBD di Kabupaten Boyolali” menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten Boyolali sudah efektif dalam merealisasikan pendapatan asli daerahnya, selain itu juga menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Boyolali terhadap pemerintah pusat cenderung menurun.

Penelitian yang dilakukan Noviandi (2005:64) yang meneliti tentang analisis perbandingan pendapatan asli daerah Kabupaten Purbalingga sebelum dan sesudah penerapan otonomi daerah, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan daerah, dan lain-lain penerimaan daerah yang sah sebelum dan sesudah otonomi daerah terdapat perbedaan yang signifikan. Kesimpulan yang lain yaitu perkembangan penerimaan pendapatan asli daerah selama periode tersebut menunjukkan peningkatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Tri Hutomo (2006:75) yang meneliti tentang “Analisis Rasio Keuangan Sebagai Pengukur Kinerja Keuangan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Kasus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar)” menyimpulkan Rasio

kemandirian Kabupaten Karanganyar masih tergolong rendah, rasio efektivitas dan efisiensi selama kurun waktu lima tahun mengalami peningkatan tiap tahunnya, rasio keserasian sebelum tahun anggaran 2003 menunjukkan bahwa dana diprioritaskan untuk belanja rutin atau belanja aparatur daerah dan mulai tahun anggaran 2003 lebih diprioritaskan pada belanja pembangunan atau belanja publik. DSCR menunjukkan bahwa secara potensial bila kekurangan dana mempunyai kesempatan untuk melakukan pinjaman, akan tetapi pertumbuhan PAD secara kualitas menunjukkan trend negatif. Analisis pembiayaan Kabupaten Karanganyar selisihnya mengalami peningkatan atau surplus anggaran pendapatan. Pola Hubungan dan tingkat kemandirian Kabupaten Karanganyar tergolong dalam pola hubungan instruktif.

Penelitian yang dilakukan oleh Susenda (2007:47) yang meneliti tentang “Pengukuran Kemampuan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Banyumas” menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan keuangan daerah Kabupaten Banyumas sebelum dan sesudah otonomi daerah. Kesimpulan lain yaitu rasio DSCR Kabupaten Banyumas sesudah otonomi daerah cenderung mengalami penurunan.

D. KERANGKA PEMIKIRAN

Undang –Undang No. 22 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentunya berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal ini berkaitan erat dengan konsep otonomi dan desentralisasi yang pada

hakekatnya memberikan kekuasaan, kewenangan dan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menentukan penggunaan dana untuk melaksanakan urusan daerahnya. Pengelolaan dana mulai dari pendapatan sampai belanja dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan dasar pengelolaan keuangan dalam masa satu tahun.

Proses penyusunan anggaran sektor publik umumnya disesuaikan dengan peraturan lembaga yang lebih tinggi. Sejalan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang direvisi menjadi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lahirlah tiga paket perundang-undangan, yaitu UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang telah membuat perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengaturan keuangan, khususnya Perencanaan dan Anggaran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Kemudian, saat ini keluar peraturan baru yaitu PP 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menggantikan Kepmendagri nomor 29 tahun 2002.

Dalam reformasi anggaran tersebut, proses penyusunan APBD diharapkan menjadi lebih partisipatif. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002 pasal 17 ayat 2, yaitu dalam menyusun arah dan kebijakan umum APBD diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat, berpedoman pada rencana strategis daerah dan dokumen perencanaan lainnya yang ditetapkan daerah, serta pokok-pokok kebijakan nasional dibidang keuangan daerah. Selain itu sejalan dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang perimbangan keuangan negara akan pula diterapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja di sektor publik agar penggunaan anggaran tersebut bisa dinilai kemanfaatan dan kegunaannya oleh masyarakat.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 menetapkan bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai. Untuk mendukung kebijakan ini perlu perlu dibangun suatu sistem yang dapat menyediakan data dan informasi untuk menyusun APBD dengan pendekatan kinerja. Anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Adapun kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik.

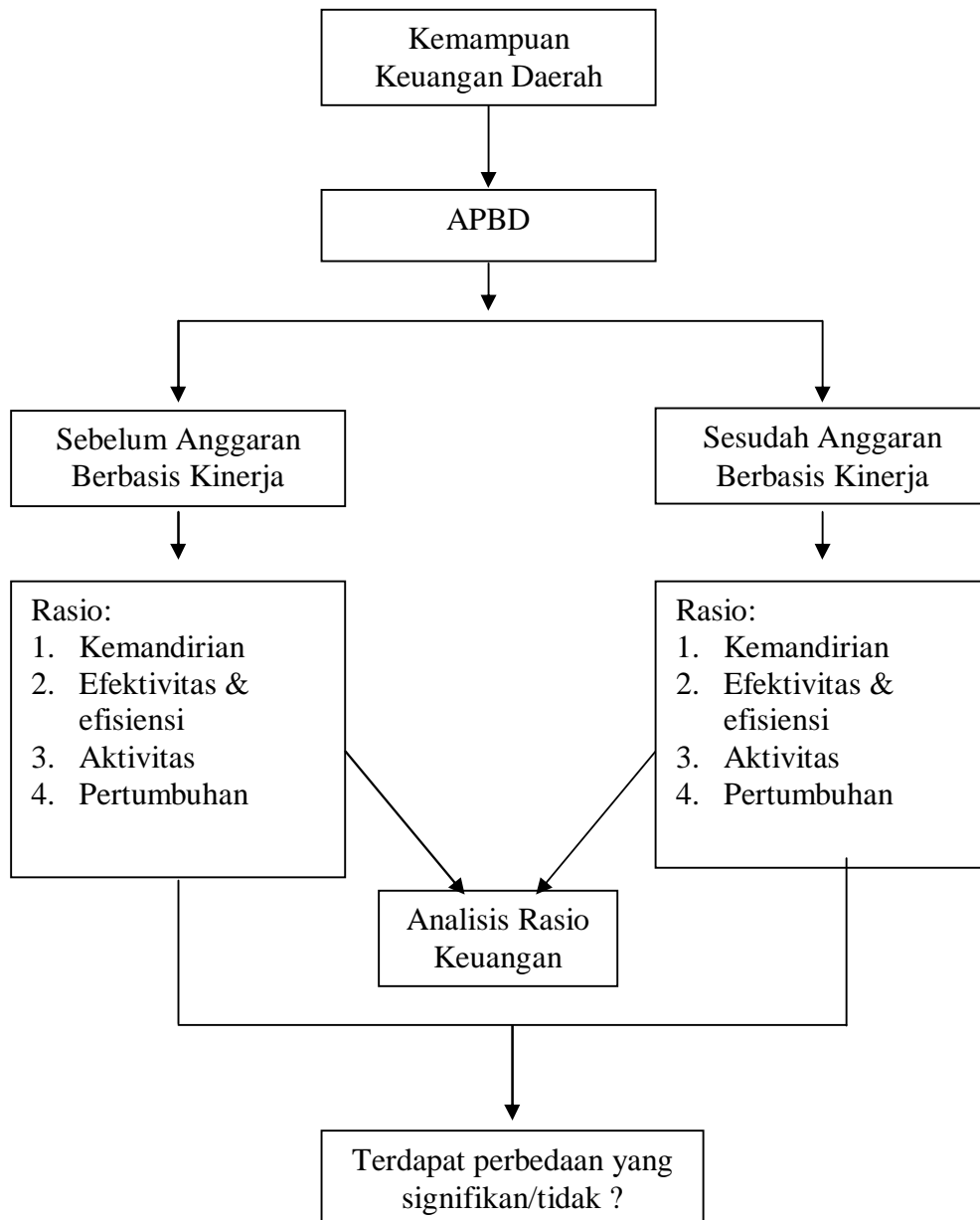
Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menggantikan Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002. Permendagri Nomor 13 diharapkan dapat lebih mudah diterapkan dan

meminimalisir tumpang tindih anggaran. Kemampuan Pemda dalam mengelola keuangan dituangkan dalam Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemda dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat.

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemda dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya,

Untuk membandingkan perbedaan terhadap APBD sebelum dan setelah anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan uji statistik.

Gambar Kerangka Pemikiran.



E. PERUMUSAN HIPOTESIS

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran di atas, sebuah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah seperti berikut ini.

H_0 = tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan keuangan daerah sebelum dan sesudah anggaran berbasis kinerja diterapkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS DAN OBYEK PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis studi kasus yang berisi laporan, gambaran, data yang relevan dengan penelitian, analisa terhadap obyek penelitian pada kurun waktu tertentu dan populasi tertentu serta mencari langkah pemecahan masalah. Obyek Penelitian ini adalah Anggaran dan Realisasi APBD, struktur penerimaan APBD Kabupaten Grobogan, rekapitulasi belanja Kabupaten Grobogan, realisasi dan target PAD, serta sumber PAD Kabupaten Grobogan Periode 2001 sampai dengan 2006.

B. METODE PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian ini menggunakan data Anggaran dan Realisasi APBD, struktur penerimaan APBD Kabupaten Grobogan, rekapitulasi belanja Kabupaten Grobogan, realisasi dan target PAD, serta sumber PAD Kabupaten Grobogan Periode 2001 sampai dengan 2006.

C. ANALISIS RASIO KEUANGAN APBD

Penelitian ini menggunakan Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas dan Efisiensi, Rasio Aktivitas, Rasio Pertumbuhan sebagai sampel data yang diteliti dan sebagai pembuktian hipotesis. Sebelum menguji apakah terdapat

perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan daerah sebelum dan setelah anggaran berbasis kinerja diterapkan dilakukan perhitungan rasio keuangan.

Analisis rasio keuangan sebagai pengukur kinerja pada APBD dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu periode 2001 – 2006, sehingga dapat dinilai kecenderungan yang terjadi.

1. Rasio Kemandirian

Menurut Widodo (2000:150) rasio kemandirian adalah rasio yang menunjukkan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan restribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan Pemerintah Pusat atau pinjaman.

$$RasioKemandirian = \frac{PAD}{Bantuan\ Pemerintah\ Pusat / Pr opinsi\ dan\ Pinjaman}$$

Semakin tinggi hasilnya, berarti semakin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah, yang berarti juga bahwa ketergantungan akan bantuan dari pemerintah pusat semakin rendah.

2. Rasio Efektivitas dan Efisiensi

a. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menurut Suhedi, Ramdan D (2000:109) menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam

merealisasikan PAD yang direncanakan dibanding dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Rasio Efektivitas =

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah}}$$

Kinerja keuangan pemerintah daerah dikategorikan efisien apabila rasio lebih dari 1 atau 100%.

b. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi menurut Suhedi, Ramdan D (2000:109) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

Kinerja keuangan pemerintah daerah dikategorikan efisien apabila rasio kurang dari 1 atau 100%.

3. Rasio Aktivitas

a. Rasio Keserasian

Menurut Widodo (2000:153) rasio keserasian menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi prosentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti prosentase belanja yang digunakan untuk menyediakan sarana dan

prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, rasio keserasian dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin (TBR)}}{\text{Total APBD}}$$

Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD =

$$\frac{\text{Total Belanja Pembangunan (TBP)}}{\text{Total APBD}}$$

b. Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

DSCR menurut Widodo (2000:156) merupakan perbandingan antara penjumlahan PAD, Bagian Daerah (BD) dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya serta Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi dengan Belanja Wajib (BW), dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo. DSCR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{(PAD + BD + DAU) - BW}{\text{Total (Pokok Anggsuran + Bunga + Biaya Pinjaman)}} \geq 2,5$$

Dengan kata lain jumlah pokok hutang, bunga dan biaya pinjaman lainnya tidak lebih dari 2,5 kali PAD, Bagi Hasil, DAU, setelah dikurangi Belanja Wajib.

4. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

D. METODE ANALISIS DATA DAN PENGUJIAN HIPOTESIS

Analisis adalah kegiatan mengelompokkan, membuat suatu urutan, serta meringkas data yang telah dikumpulkan menjadi data yang mudah dikelola dan menerapkan teknik statistika tertentu. Analisis data diperlukan untuk menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan.

Untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kinerja keuangan daerah sebelum dan setelah anggaran berbasis kinerja, dilakukan dengan menggunakan uji perbedaan dua rata-rata. Penelitian ini menggunakan sampel Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas dan Efisiensi, Rasio Aktivitas, Rasio Pertumbuhan tahun 2001 s/d 2003 sebagai sampel terhadap anggaran sebelum berbasis kinerja dan Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas dan Efisiensi, Rasio Aktivitas, Rasio Pertumbuhan tahun 2004 s/d 2006 sebagai sampel terhadap anggaran berbasis kinerja.

1. Pengujian Data Penelitian

Ketepatan pengujian suatu variabel tergantung pada kualitas data yang dipakai, dalam pengujian tersebut. Sebelum dilakukan pengolahan data untuk menguji hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji normalitas.

Penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS Windows Release versi 12 untuk normalitas data.

2. Uji Normalitas

Uji *normalitas* dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil telah memenuhi kriteria distribusi normal atau tidak. Uji normalitas menggunakan uji *one sample kolmogorof smirnov test* (k-s), uji k-s melalui bantuan aplikasi SPSS dengan kriteria yaitu apabila asymptotic significant (two tailed) $> \alpha$ ($\alpha = 0,05$) maka data berdistribusi normal dan bila asymptotic significant (two tailed) $< \alpha$ ($\alpha = 0,05$) maka data berdistribusi tidak normal.

3. Pengujian Hipotesis

Untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap pengukuran kinerja kemampuan keuangan daerah sebelum dan sesudah anggaran berbasis kinerja, dilakukan dengan menggunakan uji perbedaan dua rata-rata (uji t) dengan bantuan program SPSS 12. Uji t bertujuan untuk menguji dua sampel yang berpasangan, apakah mempunyai rata-rata yang secara nyata berbeda atau tidak. Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

Ha : Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio kemandirian antara sebelum dan sesudah anggaran berbasis kinerja

Hb : Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio Rasio Efektivitas antara sebelum dan sesudah anggaran berbasis kinerja

Hc : Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio Rasio Efisiensi antara sebelum dan sesudah anggaran berbasis kinerja

Hd : Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio Rasio Keserasian (TBR/TBAD) antara sebelum dan sesudah anggaran berbasis kinerja

He : Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio Rasio Keserasian (TBP/TBPP) antara sebelum dan sesudah anggaran berbasis kinerja

Hf : Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio DSCR antara sebelum dan sesudah anggaran berbasis kinerja

Hg : Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio Rasio Pertumbuhan PAD antara sebelum dan sesudah anggaran berbasis kinerja

Hh : Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio Pertumbuhan Pendapatan antara sebelum dan sesudah anggaran berbasis kinerja

Hi : Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio Pertumbuhan Belanja Rutin antara sebelum dan sesudah anggaran berbasis kinerja

Hj : Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio Belanja Pembangunan antara sebelum dan sesudah anggaran berbasis kinerja

Hk : Terdapat perbedaan yang signifikan pada seluruh rasio sebelum dan sesudah anggaran berbasis kinerja antara sebelum dan sesudah anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai probabilitasnya adalah sebagai berikut :

1. Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima,
2. Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak.

BAB IV

ANALISIS DATA

Pada bab ini akan diuraikan tentang pengukuran kinerja keuangan APBD Kabupaten Grobogan dilihat dari dua periode, yaitu sebelum dan sesudah anggaran berbasis kinerja. Dengan melakukan pengukuran kinerja keuangan pada APBD Kabupaten Grobogan yang didasarkan pada data-data arsip dan dokumen yang telah diperoleh dari bagian pengelolaan keuangan daerah, maka akan diketahui bagaimana kinerja keuangan sebelum dan setelah anggaran berbasis kinerja.

A. ANALISIS RASIO KEUANGAN

1. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan kontribusi sebagai sumber pendapatan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Rasio kemandirian Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{PAD}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat / Propinsi dan Pinjaman}}$$

Tabel IV.1
Rasio Kemandirian Kabupaten Grobogan
Tahun 2001 – 2006

Tahun	PAD	Bantuan	(%)
2001	17,986,930,229	256,897,333,001	7.00%
2002	27,067,567,459	305,138,415,532	8.87%
2003	37,296,065,852	392,508,827,120	9.50%
2004	37,038,759,759	416,223,890,855	8.90%
2005	29,003,028,810	419,551,866,854	6.91%
2006	40,751,671,356	597,126,310,190	6.82%

Sumber : APBD Kabupaten Grobogan diolah

Dari perhitungan di atas diketahui bahwa selama kurun waktu enam tahun (tahun 2001 – 2006), rasio kemandirian Kabupaten Grobogan mengalami fluktuasi, dan penurunan terendah terjadi pada tahun 2006. Meskipun secara kuantitas PAD Kabupaten Grobogan tiap tahunnya meningkat, akan tetapi secara kualitas menurun. Hal ini disebabkan oleh bantuan oleh Pemerintah Pusat yang tiap tahunnya semakin besar yang tidak diimbangi peningkatan PAD secara lebih proporsional. Rata-rata dari rasio kemandirian Kabupaten Grobogan sebelum anggaran berbasis kinerja sebesar 8,46% dan setelah anggaran berbasis kinerja sebesar 7,55%. Rasio tersebut menunjukkan pola hubungan Kabupaten Grobogan adalah pola hubungan instruktif.

2. Rasio Efektivitas Dan Efisiensi

a. Rasio Efektivitas

Rasio ini untuk mengetahui kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan di banding dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah dan untuk mengetahui perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rasio efektivitas dan efisiensi Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

Rasio Efektivitas

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah}}$$

Tabel IV.2.a
Rasio Efektivitas Kabupaten Grobogan
Tahun 2001 – 2006

Tahun	PAD Dianggarkan	Realisasi PAD	prosentase
2001	16,822,766,000	17,986,930,229	106.92%
2002	25,417,451,000	27,067,567,459	106.49%
2003	38,530,077,000	37,296,065,852	96.80%
2004	40,633,146,000	37,038,759,759	91.15%
2005	40,011,202,250	38,336,527,405	95.81%
2006	38,088,981,214	41,921,570,931	110.06%

Sumber : APBD Kabupaten Grobogan

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4. 2 di atas, dalam kurun waktu enam tahun, rasio efektivitas mengalami fluktuasi rasio terendah pada tahun 2004 ketika mulai diterapkannya anggaran berbasis kinerja yaitu sebesar 91.15% dan rasio efektivitas tertinggi pada tahun 2006 sebesar 110.06%. Rata-rata rasio efektivitas Kabupaten Grobogan sebelum

anggaran berbasis kinerja sebesar 103.40% dan setelah anggaran berbasis kinerja sebesar 99,01%.

Rasio tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibanding dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah cukup baik.

b. Rasio Efisiensi

Yang termasuk dalam biaya-biaya untuk memungut PAD adalah total dari biaya operasi (biaya transportasi) dan pemeliharaan yang tercantum dalam laporan Belanja Rutin atau Belanja Aparatur Daerah

$$\frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

Tabel. IV.2.b
Rasio Efisiensi Kabupaten Grobogan
Tahun 2001 – 2006

Tahun	PAD	Biaya	%
2001	17,986,930,229	48,805,842,818	271.34%
2002	27,067,567,459	3,879,845,542	14.33%
2003	37,296,065,852	8,310,910,843	22.28%
2004	37,038,759,759	6,777,747,755	18.30%
2005	38,336,527,405	5,404,824,738	14.10%
2006	41,921,570,931	12,098,482,338	28.86%

Sumber : APBD Kabupaten Grobogan dioalah

Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa rasio efisiensi pada Kabupaten Grobogan berkisar antara 14.10% - 271.34%. Rasio efesiensi Kabupaten Grobogan menggambarkan kinerja yang baik.

3. Rasio Aktivitas

a. Rasio Keserasian

Menurut Abdul Halim (2007:235) rasio keserasian menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Total Belanja Rutin (TBR) atau Total Belanja Aparatur Daerah (TBAD) dan Total Belanja Pembangunan (TBP) atau Total Belanja Pelayanan Publik (TBPP) secara optimal. Semakin tinggi prosentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti prosentase belanja yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Rasio Keserasian Kabupaten Grobogan adalah berikut:

Rasio Belanja Rutin/Belanja Aparatur Daerah terhadap APBD

$$= \frac{TBR/TBAD}{Total\ APBD}$$

Rasio Belanja Pembangunan/Belanja Pelayanan Publik terhadap APBD

$$= \frac{TBP/TBPP}{Total\ APBD}$$

Tabel IV. 3
Rasio Keserasian Kabupaten Grobogan
Tahun 2001 – 2006

Tahun	TBR/TBAD	TBP/TBPP	Total APBD	%	%
2001	268,272,676,356	15,998,032,870	284,270,709,226	94.37%	5.63%
2002	232,444,985,078	91,890,244,392	324,335,229,470	71.67%	28.33%
2003	232,444,985,078	123,757,488,425	417,279,877,942	55.70%	29.66%
2004	261,714,368,048	211,766,649,623	473,481,017,671	55.27%	44.73%
2005	120,817,559,040	331,174,704,177	451,992,263,217	26.73%	73.27%
2006	422,571,511,652	159,594,200,417	582,165,712,069	72.59%	27.41%

Sumber : APBD Kabupaten Grobogan

Dari perhitungan rasio di atas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2001 – 2003 terlihat sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan masih diprioritaskan untuk kebutuhan Belanja Rutin, sehingga rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD relatif kecil, yaitu $TBR/TBAD = 70.36\% - 94.38\%$ dan $TBP/TBPP = 5.62\% - 29.64\%$. Tetapi mulai tahun anggaran 2004 – 2006 rasio keserasian Belanja Pembangunan atau Belanja Pelayanan Publik lebih tinggi dari tahun-tahun anggaran sebelumnya, yaitu $TBR/TBAD = 26,73\% - 72,59\%$ dan $TBP/TBPP = 27,42\% - 73,27\%$.

Hal ini disebabkan pada tahun anggaran 2001 – 2004 didasarkan pada pendekatan *incrementalism*, yang dalam penentuan besar alokasi dana tiap kegiatan didasarkan pada perubahan satu atau lebih variabel yang umum, seperti tingkat inflasi dan jumlah penduduk. Bila tingkat inflasi dan jumlah penduduk meningkat, maka besar alokasi dana untuk setiap kegiatan yang sudah ditentukan akan meningkat akan lebih besar dari alokasi semula. Pendekatan lain yang digunakan adalah *line-item budget*, yaitu perencanaan anggaran yang didasarkan atas pos anggaran yang telah ada sebelumnya. Pendekatan ini tidak memungkinkan Pemerintah Daerah untuk menghilangkan satu atau lebih pos pengeluaran yang telah ada, meskipun keberadaan pos pengeluaran tersebut sebenarnya secara riil tidak dibutuhkan oleh unit kerja baik bersifat rutin maupun pembangunan.

Pada tahun anggaran 2000 - 2003 pos pengeluaran rutin diseragamkan menjadi 10 pos pengeluaran rutin, yang diantaranya terdapat 3 pos pengeluaran yang tidak jelas, yaitu belanja lain-lain, pengeluaran yang tidak termasuk dalam bagian lain, dan pengeluaran tidak disangka. Total ketiga pos anggaran tersebut proporsinya bila dibandingkan dengan total pengeluaran rutin non pegawai, maka prosentase proporsinya akan lebih besar, dan ini akan menyebabkan *underfinancing* pelayan publik. Dalam jangka panjang kondisi *underfinancing* ini jelas akan menurunkan kualitas pelayan publik yang diberikan pada masyarakat.

Pada tahun anggaran 2004 - 2006 Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam menyusun anggaran daerahnya didasarkan pada pendekatan kinerja. Hal ini berimplikasi pada Pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi dalam pengeluaran daerah. Pada pendekatan kinerja ini Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan manajemen biaya strategik dengan *memfokuskan* pengurangan biaya secara signifikan. Pada format pengeluaran atau Belanja Daerah dalam APBD sudah tidak dikenal lagi Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan/proyek. Dalam Format yang baru ini, Belanja Daerah diubah menjadi Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Publik.

Dalam rasio keserasian ini memang belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja daerah yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya

kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan

b. Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

DSCR menurut Widodo (2000:156) merupakan perbandingan antara penjumlahan PAD, Bagian Daerah (BD) dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya serta Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi dengan Belanja Wajib (BW), dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo. DSCR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{(PAD + BD + DAU) - BW}{Total (Pokok Anggsuran + Bunga + Biaya Pinjaman)} \geq 2,5$$

DSCR Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV. 4
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Kabupaten Grobogan
Tahun 2000 – 2006

Keterangan	Sebelum Anggaran Berbasis Kinerja			Setelah Anggaran Berbasis Kinerja		
	2001	2002	2003	2004	2005	2006
PENDAPATAN						
1. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu	-	-	-			
2. PAD	17,986,930,229	27,067,567,459	37,296,065,852	37,038,759,759	38,336,527,405	41,921,570,931
3. BHP/BP	10,945,907,924	26,892,784,738	35,023,264,348	28,445,566,545	29,003,028,810	40,751,671,356
4. SDO						
a. DAU	233,296,585,278	268,106,392,841	339,381,581,772	335,114,468,000	344,330,000,000	512,838,000,000
b. DAK	-	-	6,900,000,000	7,000,000,000	4,000,000,000	13,020,000,000
5. Pinjaman	5,992,790,199	-	-			
BELANJA						
6. BR/BAD	268,272,676,356	232,444,985,078	293,522,389,517	261,714,368,048	120,817,559,040	422,571,511,652
7. BP/BPP	15,998,032,870	91,890,244,392	123,757,488,425	211,766,649,623	331,174,704,177	159,594,200,417
8. Belanja Wajib (BW) (4b + 6)	268,272,676,356	232,444,985,078	300,422,389,517	268,714,368,048	124,817,559,040	435,591,511,652
9. Total Angsuran	500,719,000	4,396,293,555	262,297,851	46,477,800	1,358,921,250	3,476,734,074
10.DSCR	501.85	67.14	1,409.76	7,856.51	278.65	155.82

Berdasar perhitungan di atas dapat diketahui bahwa dari tahun 2001 – 2004 DSCR Kabupaten Grobogan secara potensial apabila terjadi kekurangan dana, maka untuk mencukupi kekurangan belanjanya memiliki kesempatan untuk melakukan pinjaman. Kemampuan tersebut dapat dilihat dari total angsuran yang lebih sedikit apabila dibandingkan dengan perhitungan maksimal angsuran pokok pinjaman yang diperbolehkan. Dengan demikian likuiditas Kabupaten Grobogan baik, karena DSCR di atas 2,5. Akan tetapi hal ini tidak lepas dari semakin meningkatnya subsidi daerah otonom berupa DAU pada tiap tahunnya yang tidak diimbangi dengan peningkatan PAD secara lebih

proporsional sehingga hal tersebut mengurangi kemandirian daerah
Kabupaten Grobogan

4. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

Rasio Pertumbuhan Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV. 5
Pertumbuhan Pos-pos APBD Kabupaten Grobogan
Tahun 2000 – 2006 (dalam ribuan rupiah)

No	Keterangan	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	PAD	7,943,335	17,986,930	27,067,567	37,296,065	37,038,759	38,336,527	41,921,570
	<i>Pertumbuhan PAD</i>		<i>1.26</i>	<i>0.50</i>	<i>0.38</i>	<i>(0.01)</i>	<i>0.04</i>	<i>0.09</i>
2	Total Pendapatan	115,469,139	274,884,263	332,205,982	429,804,892	453,262,650	457,888,394	639,047,881
	<i>Pertumbuhan Pendapatan</i>		<i>1.38</i>	<i>0.21</i>	<i>0.29</i>	<i>0.05</i>	<i>0.01</i>	<i>0.40</i>
3	Belanja Rutin	88,634,086	268,272,676	232,444,985	293,522,389	261,714,368	120,817,559	422,571,511
	<i>Pertumbuhan Belanja Rutin</i>		<i>2.03</i>	<i>(0.13)</i>	<i>0.26</i>	<i>(0.11)</i>	<i>(0.54)</i>	<i>2.50</i>
4	Belanja Pembangunan	22,554,678	15,998,032	91,890,244	123,757,488	211,766,649	331,174,704	159,594,200
	<i>Pertumbuhan Belanja Pembangunan</i>		<i>(0.29)</i>	<i>4.74</i>	<i>0.35</i>	<i>0.71</i>	<i>0.56</i>	<i>(0.52)</i>

Sumber : APBD Kabupaten Grobogan diolah

Dari perhitungan rasio tampilan di atas dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan APBD Kabupaten Grobogan pada tahun 2001 sampai

dengan 2006 menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun pertumbuhannya semakin berkurang.

B. ANALISIS DATA DAN PENGUJIAN HIPOTESIS

1. Pengujian Data Penelitian

Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil telah memenuhi kriteria distribusi normal atau tidak. Pengujian Kolmogorov Smirnov satu sampel digunakan untuk data yang kontinue, sampel yang digunakan adalah rasio kemandirian, rasio aktivitas (efektif dan efisiensi), rasio keserasian (TBR/TBAD dan TBP/TBPP), DSCR, dan rasio pertumbuhan (PAD, Pendapatan, Belanja Rutin, dan Belanja Pembangunan).

a. Uji Normalitas Per Rasio

Hasil pengujian normalitas untuk masing masing rasio dengan menggunakan bantuan program SPSS 12 for windows dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV. 6
Uji Normalitas Data

Rasio	P-Value		Interpretasi
	Sebelum	Sesudah	
Rasio Kemandirian	0,593	0,589	Normal
Rasio Efektivitas	0,575	0,580	Normal
Rasio Efisiensi	0,196	0,660	Normal
Rasio Keserasian TBR TBAD	0,592	0,689	Normal

Rasio Keserasian TBP TBPP	0,679	0,703	Normal
Rasio DSCR	0,469	0,142	Normal
Rasio Pertumbuhan PAD	0,793	0,401	Normal
Rasio Pertumbuhan Pendapatan	0,452	0,293	Normal
Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin	0,347	0,187	Normal
Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan	0,229	0,746	Normal

Sumber: Hasil Pengolahan Komputer, SPSS 12.0

Berdasarkan dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa data dari variable sebelum anggaran berbasis kinerja (2001-2003) dan data dari variable sesudah anggaran berbasis kinerja (2004-2006) menunjukkan angka probabilitas di atas 0,05 maka data berdistribusi normal sehingga dapat dilanjutkan untuk pengujian selanjutnya.

- b. Uji Normalitas Sebelum dan Sesudah Anggaran Berbasis Kinerja untuk seluruh rasio.

Hasil pengujian normalitas dengan menggunakan bantuan program SPSS 12 for windows dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL IV.7
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		SEBELUM	SESUDAH
N		10	10
Normal Parameters(a,b)	Mean	15.0030	103.4870
	Std. Deviation	45.04233	326.08823
Most Extreme Differences	Absolute	.517	.523
	Positive	.517	.523
	Negative	-.370	-.376
Kolmogorov-Smirnov Z		1.635	1.655
Asymp. Sig. (2-tailed)		.010	.008

a Test distribution is Normal.

b Calculated from data.

Berdasarkan dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa data dari variable sebelum anggaran berbasis kinerja (2001-2003) dan data dari variable sesudah anggaran berbasis kinerja (2004-2006) menunjukkan angka probabilitas di bawah 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Untuk mengatasi hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan transformasi terhadap kedua data variable tersebut. Berikut hasil dari pengujian normalitas ulang setelah transformasi.

TABEL IV.8
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		LNSebelum	LNSesudah
N		10	10
Normal Parameters(a,b)	Mean	.0099	-.5644
	Std. Deviation	1.94718	2.81416
Most Extreme Differences	Absolute	.307	.322
	Positive	.307	.322
	Negative	-.214	-.173
Kolmogorov-Smirnov Z		.970	1.018
Asymp. Sig. (2-tailed)		.304	.251

a Test distribution is Normal.

b Calculated from data.

Setelah adanya hasil pengujian ulang tersebut di atas maka kedua variabel mempunyai nilai probabilitas di atas 0,05 yaitu untuk sebelum anggaran berbasis kinerja (2001-2003) sebesar 0,304 dan sesudah anggaran berbasis kinerja (2004-2007) sebesar 0,251.

2. Pengujian Hipotesis

Setelah mengadakan pengujian normalitas maka digunakan pengujian hipotesis yaitu menggunakan uji T Test untuk melakukan analisis perbandingan terhadap dua sample yang berpasangan, yaitu sebelum

dilaksanakannya anggaran berbasis kinerja dan setelah dilakukannya anggaran berbasis kinerja apakah terdapat perbedaan yang signifikan. Pengujian dilakukan untuk masing – masing rasio dan pengujian secara serempak.

Hasil dari uji t tersebut adalah sebagai berikut :

TABEL IV.9

PENGUJIAN HIPOTESIS

No.	Jenis Rasio Keuangan yang di uji T	Paired Differences					t	df	Sig.(2- tailed)	Hasil Uji Hipotesis
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference					
					Lower	Upper				
1.	Rasio Kemandirian	0.00561	0.08963	0.03659	-0.08845	0.09967	0.153	5	0.884	Ho diterima
2.	Rasio Efektivitas	0.02167	1.11052	0.45337	-1.14375	1.18709	0.048	5	0.964	Ho diterima
3.	Rasio Efisiensi	0.41000	1.14364	0.46689	-0.79018	1.61018	0.878	5	0.42	Ho diterima
4.	Rasio Keserasian (TBR/TBAD)	0.13500	0.73361	0.2995	-0.63488	0.90488	0.451	5	0.671	Ho diterima
5.	Rasio Keserasian (TBP/TBPP)	-0.13500	0.41736	0.17039	-0.57299	0.30299	-0.792	5	0.464	Ho diterima
6.	Rasio DSCR	1052.03833	3389.09285	1383.59136	4608.67315	2504.5965	-0.76	5	0.481	Ho diterima
7.	Rasio Pertumbuhan PAD	0.33667	0.51220	0.2091	-0.20085	0.87419	1.610	5	0.168	Ho diterima

No.	Jenis Rasio Keuangan yang di uji T	Paired Differences					t	df	Sig.(2- tailed)	Hasil Uji Hipotesis
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference					
					Lower	Upper				
8.	Rasio Pertumbuhan Pendapatan	0.236 67	0.60978	0.24894	- 0.4032 5	0.8765 9	0.951	5	0.385	Ho diterima
9.	Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin	0.051 67	1.46582	0.59842	- 1.4866 1	1.5899 5	0.086	5	0.935	Ho diterima
10.	Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan	0.675 00	2.05078	0.83723	- 1.4771 6	2.8271 6	0.806	5	0.457	Ho diterima
11.	Seluruh Rasio Keuangan	0.597 96	1.31420	0.41559	- 0.3421 6	1.5380 8	1.439	9	0.184	Ho diterima

Keterangan : Jika probabilitas > 0.05 maka Ho diterima

a. Uji T Rasio Kemandirian

Berdasarkan dari tabel hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa analisis dari kinerja keuangan APBD Kabupaten Grobogan dilihat rasio kemandirian pada dua periode, yaitu sebelum dan sesudah anggaran berbasis kinerja menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah anggaran berbasis kinerja. Pada tabel di atas menunjukkan nilai t sebesar 0,153 dengan nilai probabilitas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,884 di mana angka tersebut jauh di atas 0,05, maka H0 diterima atau memiliki variance yang sama.

b. Uji T Rasio Efektivitas

Berdasarkan dari tabel hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa analisis dari kinerja keuangan APBD Kabupaten Grobogan dilihat rasio efektivitas pada dua periode, yaitu sebelum dan sesudah anggaran berbasis kinerja menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah anggaran berbasis kinerja. Pada tabel di atas menunjukkan nilai t sebesar 0,048 dengan nilai probabilitas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,964 di mana angka tersebut jauh di atas 0,05, maka H_0 diterima atau memiliki variance yang sama.

c. Uji T Rasio Efisiensi

Berdasarkan dari tabel hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa analisis dari kinerja keuangan APBD Kabupaten Grobogan dilihat rasio efisiensi pada dua periode, yaitu sebelum dan sesudah anggaran berbasis kinerja menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah anggaran berbasis kinerja. Pada tabel di atas menunjukkan nilai t sebesar 0,878 dengan nilai probabilitas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,420 di mana angka tersebut jauh di atas 0,05, maka H_0 diterima atau memiliki variance yang sama.

d. Uji T Rasio Keserasian (TBR/TBAD)

Berdasarkan dari tabel hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa analisis dari kinerja keuangan APBD Kabupaten Grobogan dilihat rasio Keserasian (TBR/TBAD) pada dua periode, yaitu sebelum dan sesudah anggaran berbasis kinerja menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah anggaran berbasis kinerja. Pada tabel di atas menunjukkan nilai t sebesar 0,451 dengan nilai probabilitas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,671 di mana angka tersebut jauh di atas 0,05, maka H_0 diterima atau memiliki variance yang sama.

e. Uji T Rasio Keserasian (TBP/TBPP)

Berdasarkan dari tabel hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa analisis dari kinerja keuangan APBD Kabupaten Grobogan dilihat rasio Keserasian (TBP/TBPP) pada dua periode, yaitu sebelum dan sesudah anggaran berbasis kinerja menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah anggaran berbasis kinerja. Pada tabel di atas menunjukkan nilai t sebesar -0,792 dengan nilai probabilitas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,464 di mana angka tersebut jauh di atas 0,05, maka H_0 diterima atau memiliki variance yang sama.

f. Uji T DSCR

Berdasarkan dari tabel hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa analisis dari kinerja keuangan APBD Kabupaten Grobogan dilihat rasio DSCR pada dua periode, yaitu sebelum dan sesudah anggaran berbasis kinerja menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah anggaran berbasis kinerja. Pada tabel di atas menunjukkan nilai t sebesar $-0,760$ dengan nilai probabilitas menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,481$ di mana angka tersebut jauh di atas $0,05$, maka H_0 diterima atau memiliki variance yang sama.

g. Uji T Rasio Pertumbuhan PAD

Berdasarkan dari tabel hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa analisis dari kinerja keuangan APBD Kabupaten Grobogan dilihat rasio Pertumbuhan PAD pada dua periode, yaitu sebelum dan sesudah anggaran berbasis kinerja menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah anggaran berbasis kinerja. Pada tabel di atas menunjukkan nilai t sebesar $1,610$ dengan nilai probabilitas menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,168$ di mana angka tersebut jauh di atas $0,05$, maka H_0 diterima atau memiliki variance yang sama.

h. Uji T Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Berdasarkan dari tabel hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa analisis dari kinerja keuangan APBD Kabupaten Grobogan dilihat rasio Pertumbuhan Pendapatan pada dua periode, yaitu sebelum dan sesudah anggaran berbasis kinerja menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah anggaran berbasis kinerja. Pada tabel di atas menunjukkan nilai t sebesar 0,951 dengan nilai probabilitas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,385 di mana angka tersebut jauh di atas 0,05, maka H_0 diterima atau memiliki variance yang sama.

i. Uji T Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin

Berdasarkan dari tabel hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa analisis dari kinerja keuangan APBD Kabupaten Grobogan dilihat rasio Pertumbuhan Belanja Rutin pada dua periode, yaitu sebelum dan sesudah anggaran berbasis kinerja menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah anggaran berbasis kinerja. Pada tabel di atas menunjukkan nilai t sebesar 0,086 dengan nilai probabilitas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,935 di mana angka tersebut jauh di atas 0,05, maka H_0 diterima atau memiliki variance yang sama.

j. Uji T Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan

Berdasarkan dari tabel hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa analisis dari kinerja keuangan APBD Kabupaten Grobogan dilihat rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan pada dua periode, yaitu sebelum dan sesudah anggaran berbasis kinerja menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah anggaran berbasis kinerja. Pada tabel di atas menunjukkan nilai t sebesar 0,806 dengan nilai probabilitas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,457 di mana angka tersebut jauh di atas 0,05, maka H_0 diterima atau memiliki variance yang sama.

k. Uji T Seluruh rasio

Berdasarkan dari tabel hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa analisis dari kinerja keuangan APBD Kabupaten Grobogan dilihat dari dua periode, yaitu sebelum dan sesudah anggaran berbasis kinerja menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah anggaran berbasis kinerja. Pada tabel di atas menunjukkan nilai t sebesar 1,439 dengan nilai probabilitas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,184 di mana angka tersebut jauh di atas 0,05, maka H_0 diterima atau memiliki variance yang sama.

3. Pembahasan Penelitian

Dilihat dari analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil uji t menunjukkan bahwa H_0 diterima dengan demikian walau terdapat pergantian peraturan anggaran berbasis kinerja untuk pengelolaan keuangan daerah namun tidak ada perbedaan yang signifikan yang terjadi dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Grobogan. Hal ini karena perubahan yang dilakukan hanya dalam bentuk format laporan keuangan serta perubahan penggolongan nama pos pendapatan dan belanja saja sedangkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Meskipun sebelum anggaran berbasis kinerja, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) dan pemberian pinjaman daerah masuk dalam elemen Pendapatan dan Belanja namun tidak cukup untuk merubah secara signifikan pengelolaan keuangan daerah apabila dibandingkan dengan setelah sistem anggaran berbasis kinerja diterapkan di mana elemen tersebut di atas masuk dalam Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Dikaitkan pada penelitian sebelumnya adalah tingkat kemandirian dari Kabupaten Grobogan relatif sama dengan Kabupaten Boyolali, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Karanganyar. Ini dilihat dari masih rendahnya potensi pendapatan asli daerah yang belum secara maksimal dikembangkan oleh masing-masing daerah tersebut. Pola hubungan

instruktif masih melekat di mana pemerintah pusat masih mempunyai peranan lebih dominan daripada pemerintah daerah.

BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang diungkapkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan penelitian rasio keuangan.

Rasio kemandirian Kabupaten Grobogan masih tergolong rendah karena kontribusi PAD sangat rendah dibanding dengan kontribusi bantuan dari pusat yang lebih dominan, Pola Hubungan dan tingkat kemandirian Kabupaten Grobogan tergolong dalam pola hubungan instruktif, karena masih berada antara 0 – 25%. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan daerah masih tinggi, terutama terhadap penerimaan dari bantuan pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU). Rasio efektivitas dan efisiensi selama kurun waktu enam tahun mengalami fluktuatif tiap tahunnya tetapi masih menggambarkan kinerja yang baik, sedang rasio keserasian periode tahun anggaran 2001 sampai dengan 2003 menunjukkan bahwa dana diprioritaskan untuk belanja rutin atau belanja aparatur daerah dan mulai tahun anggaran 2004 sampai dengan 2006 lebih diprioritaskan pada belanja pembangunan atau belanja publik. DSCR menunjukkan bahwa secara potensial bila kekurangan dana mempunyai kesempatan untuk melakukan pinjaman. Pertumbuhan APBD Kabupaten

Grobogan pada tahun 2001 sampai dengan 2006 menunjukkan pertumbuhan positif meskipun pertumbuhannya semakin berkurang.

2. Berdasarkan penelitian uji hipotesis.

Hasil pengujian data uji T Test untuk melakukan analisis perbandingan terhadap dua sample yang berpasangan, yaitu sebelum dan setelah dilakukannya anggaran berbasis kinerja menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan setelah dilakukannya anggaran berbasis kinerja. Hal tersebut karena perubahan yang dilakukan hanya dalam bentuk format laporan anggaran serta perubahan penggolongan nama pos pendapatan dan belanja saja sedangkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja tidak mengalami perubahan yang signifikan.

B. KETERBATASAN

Dalam penelitian ini, penulis menghadapi beberapa keterbatasan, antara lain adalah :

1. Perbedaan yang mendasar dari peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yaitu Manual Keuangan Daerah yang diterapkan mulai tahun 1981 sampai dengan tahun 2000 masih mempengaruhi kebijakan dalam peraturan sebelum anggaran berbasis kinerja yaitu hanya menggunakan nota perhitungan dan laporan perhitungan anggaran menyulitkan penulis untuk memisahkan antara pendapatan dan belanja

yang aktual karena dari Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai perbedaan dalam menyajikan laporan.

2. Data yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan yang tersedia hanya untuk tahun 2001 sampai dengan 2006, untuk tahun –tahun sebelumnya penulis kesulitan untuk mendapatkan datanya sedangkan untuk tahun 2007 pada saat skripsi dibuat belum dibuat secara final oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Grobogan.

C. SARAN – SARAN

Saran yang akan penulis ajukan berdasar pada uraian di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk Pemerintah Kabupaten Grobogan

Karena kemandirian Kabupaten Grobogan tergolong rendah, maka untuk meningkatkan kemandirian sesuai dengan tujuan otonomi daerah, untuk itu daerah dituntut untuk mampu mendayagunakan potensi daerah secara optimal. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Grobogan dapat menerapkan anggaran berbasis kinerja tersebut lebih baik di masa mendatang dengan pendampingan dari pemerintah pusat.

2. Untuk Pemerintah Pusat

Pemerintah Pusat lebih dituntut untuk tetap mendampingi dan mengawasi pemerintah daerah dalam melaksanakan penerapan anggaran berbasis kinerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat agar penerapan

anggaran berbasis kinerja tersebut dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan efektif.

3. Untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan bisa memperoleh lebih banyak data yang signifikan dan mempergunakan alat pengujian hipotesis yang paling baru menurut peraturan pemerintah yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Anggito, 2005. **Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang Tindih**. Pusat Statistik dan Penelitian Keuangan pada Badan Analisa Fiskal.
- Anonim, **Analisis Pengaruh Pemberlakuan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi kasus di Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri)**. <http://www.jurnalskripsi.co.cc>.
- Bahri, Syamsul, 2000. Analisis Kemandirian APBD Kabupaten/Kota. **Manajemen Keuangan Daerah. Unit Penerbitan dan Percetakan AMP YKPN**. Yogyakarta.
- Binti F, Nefi, 2002. Penilaian Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Analisis Rasio Keuangan APBD di Era Otonomi Daerah. **Skripsi**, SI UNS.
- Halim, Abdul, 2007. Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah. **Salemba Empat**. Jakarta.
- Ismail, Munawar, 2001. Pendapatan Asli Daerah Dalam Otonomi Daerah. **TEMA**, Vol II, Juni.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**. <http://www.djpkpd.go.id>.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 109 Tahun 2003 Tentang Dana Alokasi Umum Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran Tahun 2004.

<http://www.djpkpd.go.id>.

Mardiasmo, 2002. Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah. ***Jurnal Ekonomi Rakyat***. Th – No. 4, Juni.

Noviandi, Bayu, 2005. Analisis Perbandingan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purbalingga Sebelum dan Sesudah Penerapan Otonomi. ***Skripsi S1***, Universitas Jenderal Soedirman.

Nugroho, 2003. Analisa Rasio Keuangan Pada Kabupaten Boyolali. ***Skripsi S1***, UNS.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. <http://www.djpkpd.go.id>.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2003, Tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. <http://www.djpkpd.go.id>.

Pikiran Rakyat Cyber Media, 2004. Proses Penyusunan APBD Pakai Paradigma Lama “Menekankan Pada Belanja Aparatur dan Tidak Proporsional, Bandung.

Santoso, Purwo, 2002. ***Otonomi daerah : Suatu Tawaran Kerangka Konseptual***. Forum Pengembangan Partisipasi Rakyat.

- Santoso, Singgih, 2007. Soal Jawab Statistik dengan SPSS dan Excell. ***PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia***. Jakarta.
- Setyawan, Setu, 2003. Pengukuran Kinerja Anggaran Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang Dilihat Dari Prespektif Akuntabilitas. ***Balance***, Vol. I/No. I, Agustus.
- Sidik, Machfud, 2002. ***Kebijakan, Implementasi dan Pandangan Kedepan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah***, Direktorat Jendral Keuangan Pusat dan Daerah Departemen Keuangan RI.
- Simanjuntak, Tamrin. 2000. Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). ***Manajemen Keuangan Daerah. Unit Penerbitan dan Percetakan AMP YKPN***. Yogyakarta.
- Suhedi, Ramdan D. 2000. Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). ***Manajemen Keuangan Daerah. Unit Penerbitan dan Percetakan AMP YKPN***. Yogyakarta.
- Susenda, Bunga, 2007. Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Banyumas. ***Skripsi S1, Universitas Jenderal Sudirman***. Purwokerto.
- Tri Hutomo, Wiratmono, 2006. Analisis Rasio Keuangan sebagai Pengukur Kinerja Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Kasus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar. ***Skripsi S1, Universitas Sebelas Maret***. Surakarta.
- Undang-undang No. 18 Tahun 1997, Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah***. <http://www.djpkpd.go.id>.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintah Daerah.

<http://www.djpkpd.go.id>.

Undang-Undang No. 25 Tahun 1999, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. <http://www.djpkpd.go.id>.

Widodo, 2000. Analisis Keuangan Pada Kabupaten Boyolali. ***Manajemen Keuangan Daerah. Unit Penerbitan dan Percetakan AMP YKPN.*** Yogyakarta.